

ADMINISTRATIO

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

NEOSOSIALISME KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK:
PENGALAMAN VENEZUELA DI BAWAH HUGO CHAVEZ
Syamsul Ma'arif

NURCHOLIS MADJID: AN OVERVIEW ON ISLAMO-DEMOCRACY
Arizka Warganegara

CORRUPTION AND TRANSITIONAL DEMOCRACY
Budi Kurniawan

STUDI PEMEKARAN KECAMATAN PUBIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Robi Cahyadi Kurniawan, Pairulsyah

KINERJA KORPORASI DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN CSR
Damayanti

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KOTA METRO
Sutiyo

KRISIS ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(STUDI KASUS PELAKSANAAN APBD KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2008-2009)
Berly Waryanti dan Ferry Triatmojo

PENATAAN KAWASAN KONSERVASI DI DAERAH PERKOTAAN (STUDI KASUS
DI BUKIT CAMANG KOTA BANDARLAMPUNG)
MIP Hajad Andhrias Eka Putra, Nana Mulyana, Susana Indriyati Catuariani

REFORMASI AGRARIA NASIONAL (STUDI KASUS REDISTRIBUSI TANAH DI KECAMATAN
TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Linda Purnamasari dan Simon Sumanjaya Hutagalung

ADMINISTRATIO

JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK DAN PEMBANGUNAN

ADMINISTRATIO diterbitkan dua kali setahun oleh Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung, sebagai salah satu media publikasi gagasan-gagasan dan kajian ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan. Visi *ADMINISTRATIO* adalah menjadi Jurnal Ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan yang kredibel, representatif, konsisten dan terakreditasi tinggi.

SUSUNAN PENGELOLA **ADMINISTRATIO**

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN PEMBANGUNAN (JAPP)

Penanggung Jawab : Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si

Dewan Penyunting

Ketua

Anggota

: Dr. Yulianto, Drs, M.S (Unila)

1. Dr. Edward Antoni, M.S (Persadi Lampung)

2. Dr. Bambang Utoyo M.Si

3. Dr. Listyo Bawono Irianto, Drs, M.Si (UT Jakarta)

4. Syamsul Ma'arif, S.IP, M.Si

5. Meiliyana, S.IP, M.A

6. Eko Budi Sulistio, S.AP, M.AP

Penyunting Teknis : Fery Triatmojo, S.A.N., M.P.A

Adm & Distribusi : Susana Indriyati C, S.IP, M.Si

Ani Agus Puspawati, S.AP, M.AP

Bendahara : Dewi Brima Atika, S.IP, M.Si

Alamat Redaksi:

Gedung B Lt. 1 FISIP Universitas Lampung, Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Telp/ Fax (0721) 708881,
e-mail: administratio_app@yahoo.com

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah berkenan memberikan limpahan rahmatNYA kepada kita semua. Kami berharap semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan kemudahan, keberkahan, dan perlindunganNYA. ADMINISTRATIO kembali menjumpai para pembaca yang budiman dengan menyajikan 9 artikel yang ditulis oleh para pakar di bidangnya.

Syamsul Ma'arif membahas mengenai Neososialisme Kebijakan Ekonomi Politik: Pengalaman Venezuela Hugo Chavez. Syamsul Ma'arif berargumen bahwa perubahan kebijakan ekonomi politik Venezuela dan negara-negara lainnya di kawasan Amerika Latin menarik untuk dikaji di tengah situasi dunia yang kini didominasi oleh globalisasi neoliberal. Ketika sebagian besar negara-negara di dunia begitu takjup dengan neoliberalisme, Venezuela maupun di negara-negara Amerika Latin justru semakin bergerak menjauhi neoliberalisme menuju neososialisme.

Arizka Warganegara membahas mengenai Nurcholis Madjid: An Overview on Islamo-Democracy and Pluralism. Hubungan antara Islam dan Demokrasi hingga kini masih menjadi perdebatan. Sebagian memandang Islam tidak mungkin berdampingan dengan demokrasi. Sebagian lainnya justru berpendapat bahwa Islam sangat kompatibel untuk berdampingan dengan demokrasi. Pandangan terakhir ini setidaknya diwakili oleh pemikiran Nurcholis Madjid.

Budi Kurniawan dalam membahas mengenai Corruption and Transitional Democracy bertolak dari pandangan yang selama ini telah mengemuka bahwa korupsi amat subur untuk tumbuh dalam sistem politik otoritarian. Dalam konteks ini, Demokrasi diyakini mampu mengikis praktek-praktek korupsi. Namun, faktanya korupsi justru meningkat di Indonesia setelah Indonesia membuka kran demokrasi. Sebaliknya, korupsi sulit berkembang di Singapura, meski negara itu menganut sistem politik otoriter. jadi kunci sukses pemberantasan korupsi sesungguhnya lebih terletak pada kuat tidaknya penegakan hukum.

Robi Cahyadi Kurniawan dan Pairulsyah membahas mengenai pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Keduanya berargumen bahwa pemekaran kecamatan terjadi sebagai kelanjutan dari pemekaran di level Kabupaten Kota. Namun pemekaran harus dilakukan secara cermat dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dalam kajiannya mengenai Kecamatan Pubian di Kabupaten Lampung Tengah, ia sampai pada kesimpulan bahwa Kecamatan Pubian layak untuk dimekarkan.

Damayanti membahas mengenai Kinerja Korporasi dan Optimalisasi Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR). Kajian Damayanti bertolak dari pertanyaan apakah kegiatan CSR berpengaruh positif terhadap kinerja korporasi ataukah tidak. Hal ini wajar dipertanyakan mengingat CSR adalah kegiatan sosial, yang sering dipandang berlawanan dengan orientasi profit sebagaimana dianut oleh banyak korporasi. Hasil penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja korporasi.

Sutiyo membahas tentang kualitas pelayanan publik di KPPT Kota metro ini. Salah satu kesimpulan penelitian adalah adanya diskriminasi perlakuan pelayanan berdasarkan faktor suku agama, jenis kelamin/gender, dan status ekonomi kepada masyarakat pemohon perizinan di KPPT Kota Metro tidak ditemukan. Namun demikian, masih ada diskriminasi perlakuan pelayanan berdasarkan status sosial/golongan. Masyarakat pemohon yang berstatus pejabat seperti anggota dewan diupayakan dilayani lebih cepat daripada masyarakat biasa.

Berly Waryanti dan Ferry Triatmojo membahas mengenai Krisis Anggaran Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Pandangan awam selama ini menganggap krisis anggaran di tubuh pemerintah daerah semata-mata merupakan persoalan teknis berkaitan dengan kurangnya kapasitas pengelolaan keuangan di kalangan aparatur pemerintah daerah. Dalam kajiannya mengenai krisis anggaran yang menimpa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, ketiganya berargumen bahwa persoalan itu bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan pula bersifat politis.

MIP Hajad Andhrias Eka Putra, Nana Mulyana, dan Susana Indriyati Caturiani membahas mengenai Penataan Kawasan Konservasi di Daerah Perkotaan. Dengan mengambil studi kasus kerusakan lingkungan alam Bukit Camang di Kota Bandar Lampung ketiganya memandang bahwa hal ini merupakan eksekusi buruk dari pelaksanaan otonomi daerah. Mereka berargumen bahwa fenomena itu terjadi sebagai akibat rendahnya kapasitas aparatur daerah, lemahnya koordinasi antar instansi terkait, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Linda Purnamasari dan Simon Sumanjaya Hutagalung membahas mengenai Reformasi Agraria Nasional. Keduanya berargumen bahwa masalah pertanahan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memerlukan penanganan yang amat serius dan ekstra hati-hati dari pemerintah, mengingat penduduk di Indonesia, mayoritasnya menggantungkan hidupnya melalui pemanfaatan tanah terutama yang bermukim di perdesaan. Untuk menyikapi masalah pertanahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Ketetapan Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan reformasi agraria di Provinsi Lampung, yaitu pemerintah lebih memihak kepada penguasa daripada petani dalam hal pengelolaan lahan pertanian. Lahan yang dikuasai oleh petani kini sangat kecil dengan rata-rata 0,3 hektar (ha), sedangkan luas lahan yang dikuasai pengusaha yang tidak memiliki batasan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah. Akibatnya, penambahan luas pemilikan tanah petani belum terjadi, tetapi penambahan luas pemilikan tanah oleh perusahaan terus berkembang.

Kami terus berusaha melakukan perbaikan di tengah banyak kekurangan yang harus dibenahi. Redaksi berharap upaya perbaikan dan peningkatan kualitas terbitan ini kian meneguhkan langkah Jurnal Administratio untuk tetap konsisten berperan sebagai media publikasi gagasan-gagasan dan kajian ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan.

Salam

Tim Redaksi

DAFTAR ISI

Neososialisme Kebijakan Ekonomi Politik: Pengalaman Venezuela Di Bawah Hugo Chavez..... (Syamsul Ma'arif)	471
Nurcholis Madjid:An Overview on Islamo-Democracy and Pluralism..... (Arizka Warganegara)	485
Corruption and Transitional Democracy..... (Budi Kurniawan)	490
Studi Pemekaran Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah..... (Robi Cahyadi Kurniawan, Pairulsyah)	498
Kinerja Korporasi dan Optimalisasi Pengelolaan Corporate Social Responsibility..... (Damayanti)	509
Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Metro..... (Sutiyo)	524
Krisis Anggaran Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah 2008-2009) (Berly Waryanti, Ferry Triatmojo)	536
Penataan Kawasan Konservasi Di Daerah Perkotaan (Studi Kasus Di Bukit Camang Kota Bandarlampung) (MIP Hajad Andhrias Eka Putra, Nana Mulyana, Susana Indriyati Catuariani)	545
Reformasi Agraria Nasional (Studi Kasus Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)..... (Linda Purnamasari dan Simon Sumanjaya Hutagalung)	554

NEOSOSIALISME KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK (Pengalaman Venezuela Di Bawah Hugo Chavez)

Syamsul Ma'arif

Dosen Jurusan Administrasi Negara
FISIP Universitas Lampung
Email: symaarif@unila.ac.id

ABSTRACT

Third world countries, as new comer in the post colonial era, generally face many problems of choice in connection to choose what social system that must be practised. Third world countries as nation states mostly are difficult in formulating the own way. Practice in other countries like Venezuela, however, at least can be viewed as a lesson learn of how to formulate the own model of social system. This measure, of course, is carried out by estimating various unique sides in connection to socio-cultural situation owned by each country. Venezuela and Latin America at general become important to be learned. This region is so close to United State of America the heart of neoliberal power. In addition, Latin America for many years had ever become region where experiments of neoliberal policy had been practiced so early that resulting various resistance. For two decades America Latin had become area of neoliberal experiment, one decade of the last was coloured by crisis, and it made million farmers, workers, and many people came into poverty. The situation encouraged the rise of mass rebellion against neoliberalism. Venezuela and Latin America at general have moved farer and farer from neoliberalism toward the state led economic.

Key Word: neoliberal, state, economy, crisis

PENDAHULUAN

Tampilnya Hugo Chavez selaku tokoh beraliran 'kiri' menjadi Presiden Venezuela telah membuka jalan bagi kontrol dan kepemilikan saham negara—yang meningkat luar biasa—atas sumberdaya alam dan industri-industri besar. Nasionalisasi sudah dilakukan terhadap perusahaan telekomunikasi, baja, semen, listrik dan sektor perbankan. Pemerintah Venezuela terus meningkatkan kontrol terhadap pilar-pilar utama ekonomi dan meningkatkan aturan menyangkut harga pangan. Langkah-langkah ini, berbarengan dengan peningkatan pengeluaran untuk pelayanan sosial dan infrastruktur, memungkinkan Venezuela melindungi rakyat kecil dari kekacauan perekonomian dunia kapitalis.

Perubahan di Venezuela kemudian menyebar ke berbagai negara di sekitarnya. Hal ini ditandai kemenangan sejumlah tokoh 'kiri' dalam pemilu di

sejumlah negara Amerika Latin lainnya seperti: Ricardo Frolan Lagos Escobar di Cile (2000); Luiz Ignacio Lula da Silva di Brazil (2002); Nestor Kirchner di Argentina (2003); Tabare Ramon Vasquez Rosas di Uruguay (2004); Juan Evo Morales Ayma di Bolivia (2005); Veronica Michelle Bachelet Jeria di Cile (2005); Luiz Ignacio Lula da Silva di Brazil (2006); Rafael Vicente Correa Delgado di Equador (2006); Jose Daniel Ortega Saavendra di Nicaragua (2006); Hugo Rafael Chavez Friaz di Venezuela (2006); Christina Elisabeth Fernandez de Kirchner di Argentina (2007); Alvaro Colom Caballeros di Guatemala (2007); Fernando Armindo Lugo Mendez di Paraguay (2008); Evo Morales Ayma di Bolivia (2008); dan Mauricio Funes di El Salvador (2009). Kemenangan tokoh-tokoh berhaluan 'kiri' itu menempatkan hampir semua negara Amerika Latin pada posisi yang secara diametral menentang neoliberalisme (Subono, 2010).

Langkah Presiden Hugo Chavez ini menarik sekali untuk dipelajari, sebab ada kemiripan antara Venezuela dan Indonesia, yaitu sama-sama negara berkembang dan penghasil sumber-sumber daya alam. Langkah Presiden Hugo Chavez menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Venezuela dilakukannya setelah melihat kemiskinan di negerinya berlanjut, walaupun banyak perusahaan asing beroperasi di Venezuela. Hal yang patut digarisbawahi adalah semua kebijakan yang ditempuh Pemerintah Venezuela sangat bertolak belakang dengan anjuran-anjuran IMF/Bank Dunia. Hal ini berbeda jauh dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang tidak mengalami kemajuan dan justru mengalami banyak tekanan setelah mengadopsi kebijakan-kebijakan IMF. Meskipun tidak ada negara yang kebal dari hantaman krisis ekonomi global, namun pengalaman Venezuela secara jelas menunjukkan bahwa pemerintah berhasil membawa bangsa ini bangkit dari krisis dan pada saat bersamaan tampil dengan lebih melayani kepentingan rakyat pekerja daripada melayani korporasi-korporasi kapitalis.

SEKILAS TENTANG VENEZUELA

Venezuela, selaku salah satu negara di Amerika Latin, pada awalnya mampu menopang sendiri perekonomiannya tanpa bergantung pada kekuatan luar. Hal ini didukung oleh besarnya cadangan minyak bumi yang begitu besar dalam mendominasi perekonomian Venezuela. Pemerintah Venezuela menyadari besarnya potensi sumber daya alam ini. Upaya untuk memaksimalkan keuntungan atas bisnis minyak bumi kemudian ditempuh di tahun 1971 dengan mengeluarkan ketentuan mengenai pajak sebesar 70% bagi perusahaan-perusahaan minyak bumi dan Undang-Undang Reversi Hidrocarbon (*Hydrocarbon Reversion Law*).

Periode penting dalam pembangunan ekonomi Venezuela ditandai dengan kenaikan harga minyak di pasar dunia berkat desakan negara-negara pengekspor minyak bumi.¹ Kenaikan harga berlangsung

dalam dua tahap. Semula negara-negara Arab menaikkan harga minyak mentah dari US\$3 menjadi US\$ 5 per barel di pertengahan Oktober 1973 sebagai reaksi terhadap konflik Israel-Mesir (ditambah Suriah). Hanya dalam tiga bulan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) berhasil melipatgandakan harga hingga mencapai angka sekitar US\$ 12 per barel (Hiarij, 2005:65). Lonjakan harga minyak di pasar internasional ini membuat Venezuela mendapatkan keuntungan yang besar sehingga mampu melakukan peningkatan gaji, kontrol atas harga-harga barang, memberikan subsidi impor, dan memutihkan utang rakyat di bidang pertanian sebesar \$350 juta (Soyomukti, 2007:78).

Dalam upaya mempercepat nasionalisasi industri minyak, Pemerintah pada tahun 1976 membentuk PDVSA (*Petroleos De Venezuela*) selaku BUMN di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Secara formal perusahaan minyak negara ini berfungsi untuk mengumpulkan penerimaan minyak, mengkoordinasi kontrak kerja dan bagi hasil dan mengalokasikan konsesi-konsesi pengeboran. PDVSA juga menjadi mesin penggerak dan penyandang dana untuk proyek-proyek pembangunan raksasa yang berkenaan dengan strategi industrialisasi terpadu. Tapi bagi institusi militer, para perwira, para figur politik, dan pejabat PDVSA, perusahaan ini bisa menjadi sumber kekayaan dan basis finansial. PDVSA juga menjadi sumber utama kontrak-kontrak pembangunan bagi para kapitalis swasta yang memungkinkan para pejabat yang mengontrol perusahaan ini sekaligus menguasai patronase politik yang bernilai tinggi.

Dalam perkembangan selanjutnya, industri minyak merupakan bidang investasi asing yang besar, di samping merupakan sektor produksi untuk ekspor yang terbesar. Perusahaan-perusahaan asing menyediakan modal dan teknologi, sedangkan perusahaan minyak negara PDVSA menyediakan ladang-ladang konsesi yang sedang ditambang. Pemerintah mengikat para kontraktor asing melalui Kontrak *Production Sharing*. KPS ini merupakan kontrak yang telah dibakukan

¹. Peristiwa ini menandai perlawanan negara-negara OPEC atas negara-negara Industri Maju.

sehingga salah satu pihak tidak memiliki kekuatan tawar menawar. Dalam pelaksanaannya pemerintah (diwakili PDVSA) tinggal menyodorkan isi kontrak itu kepada badan usaha maupun badan usaha tetap.

Pemerintah memanfaatkan sumber dana yang melimpah dengan berekspansi mendirikan banyak BUMN disertai suntikan dana secara besar-besaran ke BUMN-BUMN tersebut untuk melakukan industrialisasi dengan investasi pada bidang-bidang strategis. Kebijakan ini merupakan suatu bentuk penolakan atas teori keunggulan komparatif dan gagasan bahwa kemajuan ekonomi Venezuela hanya dapat dicapai lewat mekanisme pasar dan perdagangan bebas. Mereka sangat yakin bahwa negara merupakan agen penting pembangunan yang mampu menyusun suatu rencana nasional dalam mencapai tujuan-tujuan khusus, seperti industrialisasi, pertumbuhan produksi, distribusi ekonomi, dan sebagainya. Langkah ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari tahun 1960-an saat pemerintah mulai mendorong industrialisasi atas hampir seluruh barang yang digunakan di Venezuela untuk mencegah ketergantungan ekonomi atas minyak. Beberapa industri yang didirikan meliputi: pengolahan makanan, tekstil, baja, bahan kimia, kayu, barang logam jadi, dan perakitan kendaraan bermotor.² Pemerintah juga menyadari bahwa cadangan minyak bakal habis bila dieksploitasi tanpa kendali. Untuk itu, Pemerintah berupaya menurunkan tingkat produksi minyak dari sekitar 3.200.000 barel per hari pada tahun 1972 menjadi 2.200.000 barel per hari pada tahun 1980 (Soyomukti, 2007:73-74).

Dalam upaya memperoleh pengaruh di tingkat regional, Venezuela mulai

memberikan bantuan pinjaman internasional bagi impor minyak negara-negara Amerika Latin melalui *Venezuelan Investment Fund* (VIF). Venezuela juga menghutangkan uang melalui *Inter-American Development Bank* (IADB). Langkah ini mampu menempatkan Venezuela sebagai pemimpin di antara negara-negara Amerika Latin, dan memberikan dukungan bagi independensi Amerika Latin dari hegemoni Amerika Serikat. Hal ini bersamaan dengan ketegangan yang berkaitan dengan embargo minyak OPEC, krisis di terusan Panama, dan keterlibatan Amerika Serikat dalam menggulingkan Presiden Chili Salvador Allende.

KRISIS EKONOMI DAN PERUBAHAN POLITIK

Perubahan politik di Venezuela dimulai ketika pendapatan minyak menurun pada tahun 1976 dan akhirnya merosot pada tahun 1978. Berkurangnya pendapatan minyak bumi di tengah pengeluaran yang ceroboh, *capital flight*, inkompetensi, dan praktik korupsi pun akhirnya menempatkan Venezuela menjadi negara penghutang. Kebijakan Presiden Carlos Andres Perez dalam masa jabatan selama lima tahun dinilai telah menghabiskan banyak biaya dan memperburuk keadaan. Hal ini membuat kekuasaannya jatuh dan digantikan oleh Luis Herrera Campins.

Presiden Luis Herrera Campins berupaya mengambil momentum harga minyak yang kembali membaik pada tahun 1980. Ia berupaya meningkatkan kontrol atas minyak dan meningkatkan gaji pegawai. Namun sebagai pemimpin baru, pemerintahannya juga menghabiskan banyak biaya seperti pemerintahan sebelumnya. Akibatnya, tingkat inflasi tetap tinggi. Sejak tahun 1979 hingga tahun 1982, Venezuela mengalami defisit sebesar \$ 8 milyar. Selain itu, kinerja ekonomi makro ditandai penurunan GDP dari rata-rata 6,1% selama 4 tahun terakhir menjadi 1,2% antara tahun 1979 dan 1983, serta angka pengangguran kurang lebih 20% pada tahun 1980 (Soyomukti, 2007:79).

Situasi ekonomi makin memburuk saat harga minyak menurun lagi pada tahun 1981 dan membuat Venezuela

². Nasionalisme ekonomi mengambil bentuk terutama industrialisasi. Dari negara-negara Amerika Latin, meminjam Raul Prebisch, lahir gagasan industrialisasi substitusi impor yang bertujuan mengganti barang-barang impor dengan produksi domestik. Perekonomian nasional bisa bebas dari ketergantungan pada luar negeri. Program ini sesungguhnya merugikan negara maju yang telah mengeksport barang konsumsi ke negara-negara bekas jajahan.

memiliki hutang sebesar \$3 milyar menjelang tahun 1983. Pemerintah mengalokasikan milyaran dollar cadangannya di PDVSA untuk membayar hutang. Tindakan ini direspon serikat pekerja (CTV) dengan melakukan berbagai macam pemogokan sepanjang pertengahan tahun 1980-an. Situasi ini membuat perekonomian Venezuela pada tahun 1983 berada dalam keadaan kacau dan menyebabkan kemiskinan rakyat menjadi berlanjut.

Presiden Carlos Andres Perez yang terpilih kembali di tahun 1989 berusaha mempertahankan legitimasi kekuasaannya melalui pencapaian prestasi di bidang ekonomi. Pengekangan politik secara ketat sebagai metode untuk mengamankan pembangunan ekonomi telah diberlakukan. Namun apabila kinerja sistem perekonomian terus memburuk, kekangan tersebut bisa dengan mudah lepas dan terurai menjadi ancaman atas stabilitas kekuasaan. Berbagai masalah ekonomi tersebut sangat membatasi ruang gerak pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai agen pembangunan. Untuk mempertahankan legitimasi dan stabilitas yang berhasil dicapainya, pemerintah terpaksa mengkaji kembali kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah diterapkan serta mencari jalan keluar baru bagi berbagai masalah yang menghadang.

Carlos Andres Perez, yang mewarisi krisis ekonomi semasa Pemerintahan Luis Herrera Campins, meminta nasehat dan bantuan keuangan dari International Monetary Fund (IMF). Memenuhi permintaan Pemerintah Venezuela, pihak IMF mensyaratkan perubahan fundamental dalam hubungan antara negara dengan pasar. Persyaratan-persyaratan ini disebut IMF *conditionality* yang dituangkan ke dalam *Letter of Intent* (LoI), berupa program-program yang disepakati oleh kedua belah pihak (pemerintah Venezuela dengan IMF) untuk melakukan perubahan ekonomi secara fundamental.

Sesuai kesepakatan yang ia tandatangani dengan lembaga tersebut, Presiden Perez mengumumkan restrukturisasi ekonomi dengan resep neoliberal. Ia mengeluarkan kebijakan suku bunga mengambang, kenaikan pajak

di sektor pelayanan publik, kenaikan upah hanya sebesar 5%, penghapusan tarif impor secara progresif, pengurangan 4% dalam defisit anggaran dan pendapatan negara, pelemahan buruh melalui sistem ikatan kerja yang lebih fleksibel, pencabutan subsidi pupuk, dan privatisasi BUMN. Dekrit eksekutif mengizinkan perusahaan asing untuk membayarkan 100% keuntungan mereka ke negara asal. Akibat kebijakan-kebijakan neoliberal ini, Inflasi mencapai 80,7%, upah riil menurun hingga 40%, pengangguran mencapai 14%, angka kemiskinan meningkat dari 43,9% pada tahun 1988 menjadi 66,5% pada tahun 1989, dan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat hingga 84%. Dalam waktu tiga tahun masa kekuasaan Perez, sekitar 600 ribu penduduk pindah ke kota-kota dan mengakibatkan jumlah tenaga kerja sektor pertanian merosot sampai 90% (Soyomukti, 2008:55).

Parahnya krisis ekonomi kemudian berkembang menjadi krisis politik berupa tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat yang tak sabar mulai melancarkan demonstrasi memprotes paket kebijakan neoliberalisme. Dipicu oleh ketidakpuasan atas kenaikan harga gas, mereka turun ke jalan menuntut agar Presiden Carlos Andrés Pérez batal melaksanakan "paket kebijakan" pasar bebas yang dipaksakan oleh IMF (dalam bentuknya yang sudah kita kenal: pencabutan subsidi, PHK massal, privatisasi BUMN, dan secara umum mereduksi peran negara dalam perekonomian). Protes ini direspon secara represif oleh militer pemerintah, sehingga terjadilah peristiwa "pembantaian Caracazo". Laporan resmi menyebutkan 276 waga sipil tewas. Namun berdasarkan temuan lanjutan atas kuburan-kuburan massal, Mahkamah HAM Inter-Amerika memperkirakan jumlah korban sesungguhnya bisa melebihi 3.000 jiwa. Peristiwa itu pada tahun 1992 menggerakkan Hugo Rafael Chavez Frias melalui barisan Bolivarian Revolution bentukannya untuk melancarkan pemberontakan atas Pemerintahan Perez. Meski pemberontakan itu gagal, namun

kejadian ini justru , meningkatkan popularitas Chavez.

Presiden Rafael Caldera yang menggantikan Carlos Andres Perez sejak tahun 1994 memberikan pengampunan kepada Chavez dan militer pemberontak. Ia pun berusaha mengutuk korupsi dan kebijakan neoliberalisme yang terjadi semasa Pemerintahan Carlos Andres Perez. Namun lemahnya posisi tawar di tengah hantaman krisis yang amat parah mendorong Pemerintahan Caldera untuk melakukan perubahan kebijakan sesuai dengan rekomendasi IMF. Pada bulan Juli 1996, Presiden Caldera menegosiasikan persetujuan penyesuaian struktural dengan IMF sehingga menyebabkan diterimanya kembali program-program neoliberal yang sebelumnya pernah ia kritik. Kebijakan ini mengakibatkan inflasi sebesar 103% pada tahun 1996 dan meningkatnya utang luar negeri sebesar \$ 26,5 milyar.

Awal 70-an dan akhir 90-an Venezuela mengalami penurunan pendapatan perkapita dan peningkatan ketidaksetaraan paling tinggi di Amerika Latin. Angka kemiskinan mencapai 33% di tahun 1975 dan meningkat tajam 70% di akhir 1995, sementara penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat dari 15% menjadi 45%. Upah minimum merosot hingga 40% di tahun 1980 layaknya upah tahun 1950-an. Orang-orang yang bekerja di sektor ekonomi informal meningkat dari 34,5% di tahun 1985 menjadi 50% di tahun 1999, paralel dengan penurunan keanggotaan serikat buruh dari 26,4% di tahun 1988 menjadi 13,5% di tahun 1995.

Tuntutan atas perubahan kebijakan semakin lantang disuarakan seiring dengan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1998. Pemilu diikuti oleh MVR (*Movimiento Quinta Republica*) selaku partai politik bentukan Chavez yang bersaing dengan Partai AD (*Accion Democratica*) dan Partai COPEI (*Comite de Organizacion Politica Electoral Independente*). Hasilnya, Hugo Chavez memenangkan pemilu dengan suara 56% mengalahkan Henrique Salas Romer yang didukung AD dan COPEI serta Irene Saez dari calon independen. Kemenangan kelompok Chavez ini menandai dimulainya perubahan radikal Venezuela yang semakin menjauhi dunia Barat.

PERGESERAN KEBIJAKAN

Tampilnya Hugo Chavez menandai perlawanan atas neoliberalisme di Amerika Latin. Serangkaian langkah perubahan kebijakan secara radikal kemudian ditempuh dalam rangka meraih kontrol atas sumber daya ekonomi dalam negeri sekaligus untuk memutus ketergantungan atas negara-negara imperialis.

1. Pembaruan Ekonomi

Presiden Hugo Chavez mengumumkan serangkaian tindakan yang bertujuan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan Undang-undang Reformasi Kepemilikan Tanah yang menetapkan bagaimana pemerintah bisa mengambil alih lahan-lahan tidur, tanah milik swasta, serta mengeluarkan Undang-Undang Hidrokarbon yang menjanjikan royalti fleksibel bagi perusahaan-perusahaan swasta yang mengoperasikan tambang minyak milik pemerintah. Chavez juga mengumumkan akan mengambil langkah-langkah ekonomi drastis antara lain berupa pematokan mata uang Venezuela pada Dollar AS serta kontrol harga dan penjualan mata uang asing untuk membantu perekonomian, yang terpuak oleh pemogokan nasional selama 63 hari. Selain itu, dalam sebuah pidatonya yang disiarkan televisi ke seluruh negeri, Chavez juga mengumumkan bahwa Venezuela telah meningkatkan produksi minyak mentahnya menjadi 1,9 juta barrel sehari, dan berangsur-angsur naik menuju produksi normalnya sebelum pemogokan yang besarnya 2,8 juta barrel setiap hari (www.militanindonesia.org, "Chavez Mengumumkan Kebijakan Radikal").

2. Reformasi Sistem Keuangan Negara

Sejak tahun 1999, Pemerintah Bolivarian telah memikirkan untuk mengonsolidasikan sistem keuangan negara secara strategis dalam rangka menguatkan kedaulatan ekonominya. Di bawah dekret No. 411, sebuah Undang-Undang yang mengatur Sistem Keuangan Negara pada 25 Oktober 1999, telah dikeluarkan. Instrumen ini dimaksudkan untuk mendukung integrasi sistem perbankan negara dalam sebuah sistem yang unik, koheren, dan efisien. Segera, BCV akan

mengambil bagian dalam sistem tersebut, dipadukan oleh Bank Industrial Venezuela (BIV), Banfoandes, Bandes, Bank Pertanian Venezuela (BAV), Bank Keuangan, Bank Rakyat Berdaulat dan Bank Perempuan.

Berkoordinasi dengan Kementerian Kekuasaan Rakyat atas Ekonomi dan Keuangan serta BCV, Pemerintah Venezuela mengembangkan sistem keuangan yang lebih sehat dalam sektor-sektor seperti perpajakan, perbankan dan moneter. Terhadap persoalan perpajakan, proses perbaikan Layanan Nasional Terpadu atas Pengaturan Pajak dan Cukai (SENIAT, Singkatak Spanyol) sejak tahun 2004 telah berkembang dan menghasilkan peningkatan eksponensial para pembayar pajak yang bahkan melampaui kontribusi minyak.

Terhadap perbankan, *Superintendence of Banks* (Sudaban, Singkatan Spanyol) mengadopsi serangkaian resolusi untuk meregulasi sistem keuangan privat/swasta dengan sistem bank internasional dalam mememanajementi beragam instrumen keuangan dan aset institusi-institusi tersebut. Terkait hal tersebut, bank-bank swasta dituntut untuk menyediakan dana jaminan guna menyokong aset-aset Venezuela yang ada di bank-bank AS yang bangkrut: Lehman Brothers dan Merrill Lynch. Seperti dilaporkan oleh Kementerian, kewajiban untuk menjual surat kepemilikannya (titles), dan langkah-langkah lainnya, menempatkan sistem keuangan Venezuela dalam cadangan yang bagus.

Setelah kudeta April, 2002, dan sabotase Minyak pada Desember 2002-Januari 2003, pada 5 Februari, 2003, "melalui suatu persetujuan antara Eksekutif Nasional dan BCV, Rezim Pembatasan Konvertabilitas/Penukaran Mata Uang Bebas (*Restriction Regime to the Currency Free Convertibility*) diadopsi untuk menghindari laju pengurangan cadangan devisa dan devaluasi (mata uang) Bolivar, sebagai dampak dari sabotase minyak oleh oposisi terhadap PDVSA serta kekeringan capital". CADIVI kemudian dibentuk sebagai alat administratif pasar pertukaran nasional yang lebih efisien dan transparan. Dampak dari kontrol pasar pertukaran mata uang yang dijalankan

CADIVI, Venezuela mencapai level bersejarah dalam cadangan devisanya. Lebih jauh lagi, sektor-sektor produksi memiliki jaminan untuk mendapatkan alokasi terhadap uang yang mereka butuhkan dalam menjalankan produksinya (www.militanindonesia.org, "Chavez Mengumumkan Kebijakan Radikal").

3. Pembentukan ALBA

ALBA (*Alternativa Bolivariana para las Americas*) merupakan kerjasama regional di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Kerjasama yang diajukan pada Desember 2001 ini merupakan alternatif terhadap FTAA (*Free Trade Area of Americas*) pada *Association of Caribbean States Summit*. Pada Desember 2004, Venezuela dan Kuba mendatangi perjanjian kerjasama dalam kerangka ALBA, dimana pada awalnya kerjasama ini untuk menyeimbangi FTAA yang didominasi oleh Amerika Serikat. Melalui strategi ini pula, Chavez dan Castro berhasil mengkonsolidasikan penolakan terhadap FTAA sekaligus mendeklarasikan ALBA—*the Bolivarian Alternative for the Americas* (Alternatif Bolivarian untuk Rakyat Amerika) di Mar del Plata, Argentina di penghujung 2005 lalu. ALBA adalah alternatif kerja sama AL melawan intervensi pasar bebas imperialis AS. Lula, Kirchner, dan Guiterrez berhasil 'didorong' menandatangani kesepakatan tersebut.

Dalam perjanjian awal kerjasama, untuk meningkatkan *Indigenous Development* dalam kerangka *Millennium Development Goals* di kedua negara tersebut merupakan sebagai upaya mencegah ketimpangan sosial yang terus terjadi di kedua negara pada khususnya dan kawasan Amerika Latin pada umumnya. Perjanjian tersebut di antaranya melakukan pertukaran antara energi dengan kesehatan, di mana Kuba akan mengirim lebih dari 20.000 dokter yang akan ditempatkan di ratusan klinik dan rumah sakit dan mengirimkan ratusan guru di beberapa sekolah di Venezuela serta menyediakan beasiswa kedokteran di berbagai universitas di Kuba. Begitu sebaliknya Venezuela akan mengirim lebih dari 100.000 barel per hari ke Kuba. ALBA

sendiri berdiri atas asas Solidaritas untuk kemajuan bersama, bentuk kerjasama diperluas menjadi pertukaran minyak dengan bahan makanan dan pertanian (bahkan sudah mencapai pertukaran bijih besi kualitas tinggi (ore) dan bauksit dengan nikel); dokter dengan mesin-mesin produksi; bantuan modal untuk pengembangan energi minyak, namun bukan dengan jalan memprivatisasikannya ke korporasi minyak dan penjualan minyak murah.

Penguatan ALBA sebagai kerjasama kawasan merupakan upaya integrasi ekonomi-politik yang berdasarkan prinsip-prinsip saling melengkapi (tidak berkompetisi), solidaritas (tidak dominasi), kerja bersama (tidak eksploitasi) dan penghormatan kedaulatan rakyat (menggantikan kekuasaan korporasi) bagi kemajuan tenaga-tenaga produktif negara-negara yang lebih miskin, sekaligus menjadi penyeimbang kerjasama kawasan yang telah ada. ALBA menekankan pada perjuangan melawan kemiskinan dan eklsusi sosial. Tujuan ALBA adalah membangun masa depan Amerika Latin yang sejahtera, menghancurkan ketidaksetaraan sosial (abhorrent social inequalities) dan menjadikan wilayah ini sebagai kekuatan yang mampu menjalankan model perekonomian sendiri di tengah globalisasi, melauli strategi ekonomi, politik, sosial-budaya yang ada di kawasan Amerika Latin (Soyomukti, 2007:138-139).

Sebagai alternatif, ALBA bertolak dari prinsip-prinsip yang diterapkan rezim Bolivarian dalam membangun ekonomi nasional. Dalam alternative tersebut seperti; (a). Pertanian untuk rakyat atau pertanian untuk pasar, (b). Hak milik intelektual atau hak rakyat pada pengobatan dan kualitas pangan yang baik, (c). Menolak liberalisasi, deregulasi dan privatisasi layanan public, (d). Dana penggantian untuk mengoreksi ketimpangan dalam ALBA. Dalam penyelenggaraan KTT ALBA di Cumana di negara bagian Sucre sangat erat kaitannya dengan peresmian penggunaan nama "Mariscal Sucre" sebagai common currency pada kelompok ini. Terlihat jelas bahwa kerjasama dalam kerangka ALBA

merupakan suatu kerjasama untuk melawan kemiskinan yang merupakan hasil dari ketimpangan dan ketidaksetaraan hasil dari globalisasi yang terjadi pada saat ini.

Kehadiran ALBA, meski masih pada tahap kampanye alternatif, berhasil memagari pimpinan-pimpinan AL yang ragu-ragu untuk bergerak menuju prinsip-prinsip saling melengkapi (ketimbang berkompetisi), solidaritas (ketimbang dominasi), kerja bersama (ketimbang eksploitasi) dan penghormatan kedaulatan rakyat (menggantikan kekuasaan korporasi) bagi kemajuan tenaga produktif negeri-negeri yang lebih miskin, sekaligus menjadi kekuatan tandingan bagi imperium Amerika Serikat.

4. Pembentukan Bank Selatan

Dalam situasi yang sangat tergantung pada kartel kreditor, sebenarnya ada sisi lain untuk bisa melakukan negosiasi. Ketergantungan pada utang luar negeri, misalnya, juga berarti ada sejumlah besar uang dari kreditor yang beredar di negara pengutang. Situasi ini bisa menjadi senjata bagi negara pengutang untuk negosiasi, dengan cara mengambil kebijakan menolak membayar utang. Inilah yang dilakukan Argentina, di bawah Nestor Kirchner, yang menolak membayar utang luar negeri sebesar US\$100 milyar. Hasilnya, seperti kata Kirchner, "untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah proses restrukturisasi berakhir dengan pengurangan secara drastis utang luar negeri negara ini."

Tetapi, tidak semua negara di Amerika Latin, adalah negara kaya seperti Argentina. Sehingga langkah yang ditempuh Kirchner, bagi negara miskin seperti Bolivia atau Haiti, mungkin terlalu berani. Apa yang terjadi di Argentina, bisa disebut sebagai sebuah contoh kasus, bukan sebuah model. Pada titik inilah, revolusi Bolivarian Venezuela, muncul dengan gagasan yang lebih realistis dengan dampak struktural yang panjang. Di bawah Chavez, negara penghasil minyak terbesar di kawasan itu, membentuk sebuah lembaga yang disebut *Compensatory Funds of Structural Convergence*. Tujuannya, mengurangi kesenjangan dalam level

pembangunan negara-negara dan sektor-sektor produktif, membentuk mekanisme yang tepat bagi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial, mendefinisikan pengertian-pengertian pembangunan secara jelas, dan menentukan bagaimana mekanisme tindak lanjutnya.

Lembaga keuangan yang merupakan bagian dari proyek ALBA (*Alternative Bolivarian para las Americas atau the Bolivarian Alternative for Latin America and the Caribbean*) ini, tugasnya mirip seperti tugas yang diemban Bank Dunia ketika pertama kali didirikan pasca Perang Dunia II: mengelola dan mendistribusikan bantuan keuangan kepada banyak negara yang ekonominya rentan oleh krisis. Dengan *Compensatory Funds* ini, negara-negara miskin dibantu untuk mengurangi resiko kerugian hingga ke tingkat yang tidak membahayakan performa ekonomi nasionalnya (Rais, 2010).

Realisasi dari kebijakan inilah menyebabkan IMF tidak lagi mendapatkan tempat. Misalnya, ketika Argentina untuk yang terakhir kalinya menyatakan "goodbye" pada IMF pada akhir Desember 2005, dengan membayar sisa utang sebesar US\$9.8 milyar (5.4 persen dari GDP), Venezuela dengan segera menyuntikkan dana sebesar US\$2.5 milyar kepada negerinya Diego Maradona itu. Bantuan ini menyelamatkan Argentina dari guncangan krisis yang kedua kalinya pasca krisis besar pada 2001. Pada akhir 2005, Venezuela juga memberikan komitmennya untuk membeli US\$300 juta bond Ekuador.

Demikian juga yang terjadi dengan Bolivia. Ketika Evo Morales, sekutu dekat Chavez, mencanangkan kebijakan nasionalisasi industri gas, reaksi keras datang dari Washington. Pemerintah Bush dengan sepihak membatalkan bantuan militer sebesar US\$1.6 juta dan bantuan lain yang berkaitan dengan pemberantasan perdagangan obat terlarang. Niat serupa juga ditunjukkan Spanyol, dimana perusahaannya Repsol YP, yang merupakan perusahaan industri gas terbesar kedua di Bolivia, terancam dengan kebijakan nasionalisasinya Morales. Bolivia juga kehilangan dana sebesar US\$170 juta dari pembatalan ekspor kacang kedele ke

Kolumbia, setelah yang terakhir ini membuat kesepakatan dagang dengan AS.

Di masa lalu, tindakan yang ditempuh Washington ini, sudah lebih dari cukup untuk menendang Morales dari istana kepresidenan. Tapi, dengan Venezuela di belakangnya, Evo hingga kini masih bertahan di kursi kekuasaannya. Dalam kasus ekspor kacang kedele tadi, Venezuela mengumumkan akan membeli seluruh produk ekspor tersebut. Venezuela juga menandatangani kerjasama dengan Bolivia untuk membeli 4.000 ton daun koka produksi Bolivia. Lebih dari itu, Venezuela bahkan mengumumkan bantuan dana sebesar US\$100 juta kepada Bolivia dan sejumlah kecil bantuan lainnya untuk mendukung rencana land reform. Dana bantuan juga mengalir ke Ekuador, yang baru saja memilih Rafael Correa, sekutu lain Chavez, sebagai presiden. Ketika Correa mengancam untuk tidak membayar utang luar negeri sebesar US\$10 milyar, pada 22 Rebruari 2007, Venezuela mengucurkan dana sebesar US\$500 juta, yang disebutnya sebagai "*financial cooperation*" (Rais, 2010).

Melalui program *Compensatory Funds* ini, Venezuela kini telah muncul sebagai negara donor baru di Amerika Latin, menggantikan keberadaan IMF. Akibatnya, dilaporkan bantuan IMF di kawasan itu jatuh sebesar US\$50 juta, atau kurang dari satu persen dari portofolio global, dibandingkan dengan 80 persen pada 2005. Dan tampaknya, kejadian ini akan terus berlanjut. Menurut laporan harian bisnis Bloomberg, Venezuela saat ini memiliki dana cadangan sebesar US\$34 milyar. Chavez juga, mengontrol US\$18 milyar dana kontan yang disebut Ponden, yang ditransfer dari Bank Sentral dan perusahaan minyak negara Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Dan berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan internasional dan pemerintah negara-negara G-7, bantuan Venezuela ini tidak disertai dengan persyaratan apapun yang mesti dijalankan negara penerima bantuan. Inilah yang disebut sebagai Solidaritas Bolivarian.

Untuk melembagakan program Solidaritas Bolivarian ini, Chavez mengusulkan agar dibentuk *Banco del Sur*

atau *Bank of the South*. Menurut Chavez, dalam pidatonya di hadapan ribuan pendukungnya di Buenos Aires, Argentina, pendirian *Banco del Sur* ini dimaksudkan untuk menghentikan lingkaran setan kemiskinan utang luar negeri. Masih menurut Chavez, pada 20 hingga 30 tahun yang lalu, kawasan itu telah membayar lebih dari US\$ 2.2 milyar utang luar negeri. Jika ini tidak dihentikan, maka dalam beberapa waktu ke depan kawasan itu harus membayar utang luar negeri lima kali lipat lebih banyak (Rais, 2010). Rencana pendirian *Banco del Sur* ini disusul dengan usulan agar dibentuk mata uang bersama Amerika Latin, sebagai alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan internasional yang dikontrol AS, dan dominasi mata uang dollar, serta untuk transaksi komoditi.

5. Menangkal Propaganda Amerika Serikat

Dalam bidang budaya, sebuah stasiun televisi regional Telesur, diluncurkan 24 Juli, 2005, bersamaan dengan peringatan hari lahir ke 222 Simon Bolivar. Telesur bertujuan menghancurkan hegemoni propaganda AS di seluruh benua ini. (Telesur adalah sebuah perusahaan pertelevisian bersama antara Venezuela, Argentina, Kuba dan Uruguay, yang selama 24 jam penuh melakukan siaran sejak akhir Oktober tahun lalu). Direktur informasi Jorge Botero, menjelaskan: "Dunia yang unipolar ini, di mana semua orang berkiblat ke utara dengan hormatnya, yang berakhir pada pembudakan, harus segera diakhiri. Bagi kami, cakrawala sesungguhnya terbentang lebih luas daripada yang dilihat dari Washington, dan karena itulah moto kami adalah 'Utara Kami adalah Selatan'.

6. Mendirikan Dana Pembangunan Nasional (FONDEN)

Suatu langkah penting strategis menuju kedaulatan ekonomi adalah pendirian Dana Pembangunan Nasional (FONDEN), didirikan pada bulan September tahun, 2005, yang berfungsi untuk mengatur pendapatan dari surplus minyak yang, sejak dulu, merupakan basis penting bagi penentuan cadangan mata uang asing negeri ini. Institusi tersebut antara lain mensponsori pertanian, kesehatan,

infrastruktur, pendidikan tinggi dan proyek perumahan, yang merupakan sebagian dari cara bagaimana investasi sosial—berkisar 60% dari keseluruhan pengeluaran anggaran Investasi Pemerintah—dapat diwujudkan. Bersama transfer cadangan surplus devisa, mekanisme tersebut menyebabkan Venezuela tidak mengemis jalan keluar pada Institusi semacam IMF.

7. Diversifikasi Ekonomi

Venezuela saat ini mengimpor hampir 70% produk-produk konsumsi, sebagian besar karena besarnya pendapatan minyak Venezuela membuatnya relatif lebih mudah untuk membeli lewat impor, juga karena lebih mahal bila memproduksinya di dalam negeri. Pemerintah Chavez sudah berulang kali menyatakan bahwa memang sudah menjadi komitmen pemerintah untuk mendiversifikasi ekonomi dalam negeri. Sementara ekspor non-tradisional, seperti produk pertanian, sudah meningkat dalam dua tahun terakhir. Meningkatnya pendapatan minyak membuat perbandingan antara ekspor non-tradisional dan minyak sedikit banyaknya bisa dikatakan sama.

Dalam upaya mengurangi ketergantungan Venezuela terhadap impor, Pemerintah Venezuela mengumumkan bahwa negeri itu akan mengurangi ekspor aluminium hingga nol di tahun 2012, sehingga aluminium yang diproduksi di dalam negeri dapat digunakan untuk kegiatan produksi di dalam negeri. Dengan tidak mengekspor aluminium dan kayu hingga nol persen pada tahun 2012, Venezuela bertekad untuk memproses sendiri 100% bahan mentah melalui industri-industri yang ada di dalam negeri. Bila ini dapat dilakukan, maka Venezuela dalam enam tahun ke depan akan menargetkan menjadi negara industri.

Dalam upaya memutus ketergantungan ekspor minyak ke Amerika Serikat, Venezuela juga telah memutuskan mendiversifikasi negara tujuan ekspor hidrokarbon (Minyak, Gas, produk-produk Kimia-minyak) di luar pasar Amerika Serikat. Terkait dengan hal tersebut, inisiatif-inisiatif pengalokasian minyak di negeri-negeri Karibia telah dikonsolidasikan bersama dengan

Petrocaribe (didirikan pada bulan Juni, 2005), dan meluas ke dua negeri Amerika-Tengah yaitu Guatemala dan Honduras. Venezuela juga telah memperluas pasar ekspor dengan menjual minyak ke China sebesar 350,000 bpd dengan ekspektasi peningkatan menjadi 500,000 bpd pada periode jangka pendek ke depan.

Lebih jauh lagi, sebuah aliansi dengan perusahaan minyak negara milik Rusia Gazprom Lukoil, dan persetujuan dengan Portugal telah dibangun dalam rangka penyediaan suplai 2 juta meter kubik gas per tahun dan minyak sebesar 30,000 bpd. Selain itu, persetujuan eksploitasi bersama atas blok-blok tertentu di Sabuk Minyak Orinoco (Orinoco Petroleum Belt) telah disetujui oleh sepuluh negeri. Hal tersebut menjamin tujuan baru bagi minyak mentah nasional.

8. Mendirikan BUMN

Pada bulan Februari 2006, Chavez meluncurkan 12 perusahaan baru milik negara untuk mendorong industri baru yang akan menggantikan sebagian besar produk yang diimpor Venezuela. Industri-industri tersebut akan mencukupi hampir semua kebutuhan dasar, mulai dari kertas, plat aluminium, tekstil, pipa-pipa baja, serta komponen-komponen produksi. BUMN tersebut diberi nama Coniba yang dalam bahasa Spanyol berarti Perusahaan Nasional Industri-Industri Dasar. Dana investasi yang dikeluarkan sebesar \$ 3,5 milyar yang berasal dari Dana Pembangunan Nasional (FUNDEN) milik negara. Menurut Alvarez, BUMN tersebut akan menciptakan 20.000 lapangan kerja langsung maupun tak langsung (Soyomukti, 2007:111).

Coniba akan didanai oleh investasi senilai \$3,5 Milyar, yang berasal dari Dana Pembangunan Nasional (FUNDEN) milik negara. Sumber dana Funden adalah sebagian cadangan mata uang asing milik Bank Sentral. Menurut Victor Alvarez, Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan Venezuela, BUMN tersebut akan menciptakan 20.000 lapangan kerja langsung maupun tak langsung. Pendirian Coniba oleh Pemerintah Chavez, "merupakan bagian dari bentuk pemerataan minyak dan kebijakan

endogenous development," ujar Alvarez ketika peresmian BUMN tersebut. Endogeneous development (pembangunan Endogeneous) adalah istilah yang selama ini digunakan Pemerintahan Chavez untuk menggambarkan kewajiban membangun ekonomi negeri "dari dalam", yakni, tanpa mengandalkan/mengutamakan, para investor dari luar. Rencana "penyebarluasan minyak,"—sebuah pernyataan yang dipinjam dari tahun-tahun bom minyak Venezuela di era 1970an—merupakan suatu rencana pemanfaatan kekayaan minyak negeri untuk investasi serta diversifikasi ekonomi dalam negeri.

Perusahaan-perusahaan ini disebut sebagai Perusahaan Produksi Nasional, yang berarti industri yang tidak eksploitatif atau berorientasi pada perolehan keuntungan semata. Pemerintah selalu menegaskan bahwa bekerja (dalam perusahaan-perusahaan ini) akan menghilangkan karakter alienasi (keterasingan) dan kerja yang dilakukan justru harus menjadi sebuah unsur pembentuk kesadaran. Produk-produk yang dihasilkan juga akan dijual dengan harga solidaritas. Hugo Chavez ketika berpidato dalam pelantikan para pemimpin perusahaan negara tersebut menyatakan bahwa Perusahaan Produksi Sosial, akan bekerja menuju penghapusan hirarki dan ketidaksetaraan di tempat kerja, yang bertolak belakang dengan kapitalisme di mana seseorang mendiskriminasi berdasarkan jenis pekerjaan yang seseorang lain lakukan. "Kita semua setara....tak seharusnya terdapat tingkatan hak-hak istimewa di tempat kerja," ujar Chavez.

9. Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan

Pemerintah neoliberal sejak 1970-an membiarkan kekayaan minyak dikuasai oleh pemodal-pemodal Chevron Corps; Royal Dutch Shell; Repsol; dan Exxon. Akibatnya pendapatan minyak terbesar masuk ke pundi-pundi pemodal dan pejabat di sekeliling elit-elit berkuasa COPEI dan *Action Democratica*. Bahkan sejak 1977 sekitar 50% perusahaan-perusahaan raksasa di Venezuela memiliki ikatan dengan modal AS. PDVSA harus dinasionalisasi sebab PDVSA merupakan perusahaan negara yang paling besar dan

paling banyak mempekerjakan buruh; sementara Venezuela adalah anggota OPEC; dan bagi belahan bumi barat merupakan salah satu eksportir minyak terbesar kelima dan terbesar ketiga bagi Amerika Serikat. Industri minyak memberikan sepertiga penuh bagi GDP Venezuela. Kontrol terhadap PDVSA berarti

bukan hanya kontrol terhadap keuntungan Venezuela tetapi juga kontrol terhadap pasar minyak dunia. Produksi minyak mentah tiap harinya sekitar 3 juta barrel dan 75%nya diekspor. Pendapatan devisa dari hasil ekspor minyak berkisar antara \$3 miliar dan \$4 miliar dollar setahunnya.

Tabel 1
Nasionalisasi Perusahaan di Venezuela

Tanggal	Kebijakan
Desember 2001	Presiden Venezuela, Chavez merenasionalisasi PDVSA
Desember 2006	Presiden Venezuela, Chavez menasionalisasi 2 lapangan minyak yang dikelola TOTAL SA (Perancis) dan ENI (Italia).
3 Februari 2007	Pemerintah membeli mayoritas perusahaan telepon CANTV yang sebelumnya dimiliki Verizon dari AS.
8 Februari 2007	Pemerintah membeli mayoritas saham pembangkit listrik Electricidad de Caracas, juga dari perusahaan AS, AES.
13 Februari 2007	BUMN perminyakan PDVSA membeli pembangkit listrik Electrica Seneca dari perusahaan AS, CMS Energy.
1 Mei 2007	Pemerintah Chavez mengumumkan program nasionalisasi ladang minyak Orinoco Belt, yang dioperasikan oleh 13 perusahaan asing. Mayoritas perusahaan asing mau menjual hak operasinya, sementara ExxonMobil dan ConocoPhillips menolak dan menggugatnya ke arbitrase internasional.
20 Februari 2008	Venezuela membayar 1,8 miliar dollar AS kepada perusahaan-perusahaan minyak Perancis, Norwegia dan Italia sebagai kompensasi untuk nasionalisasi ladang-ladang minyak utama di cekungan Orinoco pada 2006. Perusahaan minyak Perancis (Total), Statoil (Norwegia) dan ENI (Italia) mencapai kesepakatan setelah mereka menyetujui harga nilai buku untuk aset yang diambil alih perusahaan minyak milik pemerintah Venezuela PDVSA. Total mendapatkan 834 juta dollar AS, ENI 700 juta dolar AS dan Statoil 266 juta dollar AS.
3 April 2008	Chavez mengumumkan akan menasionalisasi industri semen, dan memberi batas waktu kepada perusahaan-perusahaan semen asing yang untuk segera menyerahkan 90% sahamnya.
12 Mei 2008	Pemerintah mengeluarkan UU untuk bisa mengambil alih operasional perusahaan besi dan baja, Orinoco Ternium-Sidor. Pemerintah kini sedang bernegosiasi untuk membeli mayoritas saham perusahaan besi dan baja Amazon Consortium.
31 Juli 2008	Chavez mengumumkan untuk membeli Banco de Venezuela, yang sebelumnya dikuasai oleh bank dari Spanyol Santander.
18 Agustus 2008	Venezuela berhasil menguasai anak usaha Lafarge dan Holcim, namun gagal mencapai kesepakatan untuk mengambil anak usaha Cemex dan memutuskan untuk membekukannya.
5 November 2008	Presiden Venezuela itu mengambil langkah kontroversi dengan mengambil alih tambang emas terbesar di negerinya yang kini dimiliki oleh perusahaan dari Kanada, Crystallex. Tambang emas yang akan diambil alih adalah, tambang Las Cristinas, di bagian Tenggara negara bagian Boliver. Tambang ini diperkirakan memiliki cadangan hingga 16,9 juta ounce. Saham Crystallex langsung merosot 25,5% setelah pengumuman nasionalisasi itu. Produksi emas Venezuela direncanakan akan meningkat dari 4,2 ton menjadi 8,2 ton per tahun mulai 2009.
8 April 2009	Wakil Presiden Venezuela Ramón Carrizales mengumumkan

	keputusan Chavez untuk menasionalisasi SIDOR, sebuah pabrik baja raksasa yang berlokasi di dekat Ciudad Guayana di bagian timur Venezuela, yang mempekerjakan sekitar 15.000 pekerja.
8 Mei 2009	Pemerintah Venezuela memulai proses nasionalisasi 60 kontraktor jasa minyak. Para kontraktor tersebut akan di bawah pengawasan perusahaan minyak milik pemerintah, Petroleos de Venezuela.
2 Juli 2010	Venezuela berhasil menasionalisasi 11 perusahaan minyak Amerika Serikat, perusahaan Helmerich dan Payne terakhir kali diambil alih Presiden Hugo Chavez.

Sumber: www.detikfinance.com, "Rekor Nasionalisasi Chavez"

10. Pembentukan Aliansi Global

Dalam rangka membebaskan Venezuela dari penindasan mekanisme keuangan kapitalis (IMF, WTO, dan Bank Dunia), Presiden Chávez dan pemerintahannya telah merancang sebuah kelompok aliansi-aliansi strategis bersama (negeri-negeri) yang ekonominya sedang berkembang maju, seperti Brazil, Rusia, India, China, Iran dan Belarusia. Di bidang politik, Venezuela bersama Kuba dan Bolivia menyatakan diri sebagai Axis of Good guna menentang klaim AS atas Kuba, Libya, Iran, dan Syria sebagai Axis of Evil. Bersama Kuba dan Bolivia, Venezuela terus mengkonsolidasikan dan mengkongkritkan potensi-potensi perlawanan pemerintah negara-negara Amerika Latin terhadap neoliberalisme. Dalam pidatonya dihadapan Parlemen Venezuela 14 Januari 2005, Chavez menyatakan bahwa strategi ofensif internasional dibutuhkan untuk melawan hegemoni imperium AS di dunia. Inilah yang melandasi lawatan Chavez ke berbagai negeri yang dianggap 'berpotensi' melakukan oposisi terhadap Amerika Serikat. Mulai dari kawasan Timur Tengah (Iran, Syria), Afrika (Libya), Eropa (Rusia, Belarusia) hingga Asia (China, Vietnam, Malaysia).

11. Pembaruan Kontrak Minyak Venezuela
Pemerintah Presiden Venezuela Hugo Chavez pada tanggal 12 Mei 2010 menandatangani perjanjian dengan perusahaan minyak Amerika Serikat Chevron dan Repsol Spanyol. Kontrak bernilai hingga mencapai 40 miliar dollar AS dimaksudkan untuk membangun cadangan di kawasan kaya minyak, Orinoco Belt. Berdasarkan perundangan-undangan investasi baru yang disetujui pada 2007,

perusahaan minyak milik pemerintah Petroleos de Venezuela (PDVSA) minimal memiliki 60 persen saham pada setiap proyek Orinoco. Chevron memimpin sebuah kelompok perusahaan, termasuk Impex, Mitsubishi Jepang, dan Suelopetrol Venezuela akan beroperasi di Carabobo Bloc Three. Sementara itu, Repsol yang memimpin sebuah kelompok yang mencakup perusahaan minyak Malaysia, Petronas, dan juga perusahaan India ONGC, Indian Oil, dan Oil India ditugaskan pada Carabobo Bloc One (www.internasional.kompas.com, "Chavez Teken Perjanjian 40 Miliar Dollar AS").

Menteri Perminyakan dan energi Rafael Ramirez, yang juga pimpinan PDVSA menyatakan investasi mereka akan menjadi sekitar 15 miliar dollar AS hingga 20 miliar dollar AS per proyek, dan produksi akan berkisar 400.000 hingga 480.000 barrel per hari setiap blok. Untuk beberapa tahun, para ahli percaya bahwa perlu biaya mahal untuk menyedot dan menyuling minyak jenis berat dan sangat berat di Orinoco Belt, kawasan seluas 55.314 kilometer persegi, di sekitar Orinoco River. Namun, penurunan dalam cadangan minyak ringan dan meningkatnya harga minyak dunia telah meningkatkan minat para investor asing. Peningkatan saat ini berkisar 75 dollar bdp dibanding 20 dollar bdp sekitar tahun 1990-an.

Antonio Brufau selaku pimpinan Repsol dan Ali Moshiri selaku pimpinan produksi dan eksplorasi Chevron untuk kawasan Afrika dan Amerika Latin menandatangani perjanjian pada suatu acara bersama dengan Chavez. "Proyek-proyek yang sedang berjalan di Orinoco Belt ini menyumbangkan 80 miliar dollar AS dalam investasi," kata Ramirez. Menurut

Ramirez, Orinoco Belt diproyeksikan memproduksi 4,6 juta barrel minyak per hari pada 2020. Dengan demikian, produksi Venezuela secara keseluruhan menjadi 6,8 juta barrel per hari atau naik dari 3,0 juta barrel per hari, saat ini. Beberapa perusahaan minyak, seperti ConocoPhillips dan ExxonMobil, yang berbasis di Amerika Serikat meninggalkan Venezuela setelah pemerintah Chavez mengubah undang-undang investasi pada 2007 dan melakukan nasionalisasi aset-aset mereka. Namun, perusahaan minyak lainnya, termasuk Chevron dan Repsol, berusaha tetap berada di negara itu dan berinvestasi di bawah peraturan baru Venezuela (www.detikfinance.com, "Hugo Chavez Ambil Alih 11 Pengeboran Minyak Milik AS).

CAPAIAN DI BIDANG EKONOMI

Ekonomi Venezuela meningkat secara signifikan. Hingga tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Venezuela mencapai lebih dari 9%. Sebagaimana dilaporkan sejak awal oleh Bank Sentral Venezuela, pertumbuhan terkuat justru berada di sektor non minyak, terutama jasa konstruksi. Didalamnya meliputi proyek pembangunan masyarakat yang berupa pembangunan rumah-rumah untuk rakyat. Pada tahun 2005, Venezuela menjadi negara dengan tingkat GDP tertinggi di Amerika Latin karena pertumbuhan ekonominya sebesar 9,3%.

Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat (*United States International Trade Commission*) melaporkan bahwa pada tahun 2005 Venezuela menjadi mitra dagang kedua AS di Amerika Latin (melebihi Brazil) dan di bawah Meksiko. Di tingkat dunia, Venezuela menjadi mitra dagang AS ke-13. Wall Street Journal melaporkan bahwa Venezuela adalah pemilik cadangan minyak mentah (*heavy crude oil*) terbesar di dunia, bahkan melebihi Saudi Arabia. Venezuela merupakan satu-satunya negara pemilik cadangan minyak terbesar di belahan bumi Barat (*western hemisphere*). Ekspor minyak melonjak sebesar 16,6 miliar dollar pada kuartal kedua tahun 2006 (Soyomukti, 2008:90).

Di samping itu, upaya untuk menghilangkan pengangguran menunjukkan

perkembangan yang terus menerus. Di akhir 2004, pengangguran mencapai titik terendah 10,9%. Di awal tahun 2006, angka pengangguran turun drastis dari tingkat tertingginya pada Januari sebesar 12,9%. Pejabat Lembaga Statistik Nasional memprediksikan bahwa jumlah itu akan terus menurun dengan perkiraan mencapai angka 7% di akhir tahun. Buktinya, pada Maret saja jumlah pengangguran menurun menjadi 10,1%, lebih kecil dari jumlah pengangguran di Washinton Amerika Serikat. Angka ini kembali turun pada bulan Juni menjadi 9,7%.

Aktivitas ekonomi non minyak meningkat pesat; sektor bangunan 40,3%, institusi keuangan 27,2%, transportasi dan pertokoan 24,8%, sektor manufaktur 20,7%, produksi alat-alat berat 161,3%, produksi kayu 132,3%, tekstil dan garment 85,1%, produksi perabot 71,2%. Kondisi ekonomi pun membaik. Inflasi di akhir 2004 menurun hingga 19,2% dan terus menurun di tahun 2005. komitmen Chavez terhadap rakyat juga dibuktikan dengan mengalokasikan sebesar 38% dari keseluruhan anggaran negara digunakan untuk program-program sosial (Soyomukti, 2008: 91).

Pemerintah Venezuela juga mengumumkan rencana menaikkan upah minimum. Pada September 2006, upah yang diberikan meningkat 10%, berlaku baik bagi pekerja negara maupun sektor swasta. Hal itu merupakan tindak lanjut dari kebijakan menaikkan upah sebesar 20-30% terhadap gaji buruh yang dilakukan sejak tahun 2000. dalam pidato yang sama, Chavez mengatakan sebesar Bs 2,5 trilyun (hampir \$1,2 milyar atau Rp 1,2 trilyun) akan dialokasikan untuk kenaikan gaji pegawai negeri. Kenaikan ini sekitar 3 kali dari kenaikan tahun sebelumnya untuk pegawai negeri. Selama dua tahun sebelumnya, pemerintah hanya memberi kenaikan pada pegawai negeri yang berpenghasilan minimum, sekitar \$ 2000 atau lebih kurang Rp 2 juta per bulan. Sementara kaum buruh, pada saat itu bahkan mereka yang berpenghasilan mendekati skala terkecil belum menerima kenaikan dalam tiga tahun.

KESIMPULAN

Tampilnya Hugo Chavez menandai perubahan penting, bukan hanya menyangkut Venezuela, melainkan pula perkembangan Amerika Latin secara keseluruhan. Kini di Venezuela bahkan di sebagian besar Amerika Latin sedang timbul gelombang besar anti neoliberalisme yang digerakkan oleh Hugo Chavez. Tokoh-tokoh Amerika Latin, seperti Hugo Chavez yang disusul tokoh-tokoh lainnya, terbukti semakin berani mencari jalan sendiri untuk meninggalkan ikatan-ikatan ekonomi dan politik yang selama ini dirasakan menyengsarakan. Tokoh-tokoh itu, dengan caranya masing-masing telah memberikan pertanda yang sangat jelas bahwa Amerika Latin tidak lagi bersedia menjadi agen neoliberalisme.

Indonesia dan Venezuela merupakan sesama negara berkembang yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah. Perbedaannya, kekayaan alam di Indonesia menjadi semacam kutukan akibat ketidakmampuan para pemimpinnya dalam menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam. Sebaliknya, kekayaan alam di Venezuela menjadi semacam rahmat berkat keberanian para pemimpin Venezuela dalam mengembalikan kedaulatan negara atas sumber daya alaminya melalui kebijakan nasionalisasi.

Indonesia memang bukan Venezuela, dan Indonesia tidak harus meniru model Venezuela. Begitu juga satu kebijakan tidak selalu cocok untuk semua keadaan. Namun sekali lagi, amat penting untuk belajar dari pengalaman Venezuela. Pengalaman Venezuela memberikan pelajaran bahwa para pemimpin Indonesia harus berani melakukan terobosan untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan

negara ini. Tidak ada yang bisa diharapkan membantu, kecuali berkat usaha bangsa sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Hiarij, Eric, 2005, *Materialisme Sejarah Kejatuhan Soeharto, Pertumbuhan dan Kebangkrutan Kapitalisme Orde Baru*, Yogyakarta: IRE Press.

Rais, M Amin, 2010, *Selamatkan Indonesia*, Yogyakarta: PPSK

Soyomukti, Nurani, 2007, *Revolusi Bolivarian Hugo Chavez dan Politik Radikal*, Yogyakarta: Resist Book.

Soyomukti, Nurani, 2008, *Hugo Chavez Vs Amerika Serikat*, Yogyakarta: Garasi

ARTIKEL

Subono, Nur Iman, "Jalan 'Kiri' Amerika Latin: Sebuah Era Baru?", artikel, dalam PRISMA Vol 29 Januari 2010.

INTERNET

www.militanindonesia.org, "Chavez Mengumumkan Kebijakan Radikal Melawan Kapitalisme di Venezuela".

www.detikfinance.com, "Rekor Nasionalisasi Chavez"

www.detikfinance.com, "Hugo Chavez Ambil Alih 11 Pengeboran Minyak Milik AS"

www.internasional.kompas.com, "Chavez Teken Perjanjian 40 Miliar Dollar AS"